TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NO.6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar

Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administarsi Publik

Disusun Oleh :

AGUS DHANANG PURNOMO

NIM. 530030504

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2023

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) BERDASARKANPERATURAN MENTERI ATR/BPN NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Agus Dhanang Purnomo
agusdhanangpurnomo@gmail.com
Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021. Meskipun target pendaftaran tanah sebanyak 27.440 bidang, hanya 17.692 bidang yang berhasil diterbitkan sertifikatnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami implementasi kebijakan PTSL, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan informan, dan data sekunder dari studi pustaka dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PTSL dilaksanakan melalui 13 tahapan, namun beberapa tahapan seperti perencanaan, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan yuridis, serta penerbitan sertifikat masih belum berjalan dengan baik. Dalam analisis implementasi kebijakan menurut Edward III, sumber daya dan disposisi dapat dikatakan berhasil, sedangkan struktur birokrasi dan komunikasi masih belum berhasil. Beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan PTSL adalah pandemi Covid-19, tanda batas yang tidak terpasang seluruhnya, pemilik tanah yang tidak berada di lokasi PTSL, tanah masyarakat yang berada dalam kawasan hutan, dan masih dikenakannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhutang. Faktor pendukung implementasi kebijakan PTSL adalah optimalnya pembentukan tim panitia ajudikasi kantor pertanahan, pengumpulan data fisik oleh KJSKB Muhammad Masykur dan Rekan, serta pengumpulan data yuridis oleh Puldatan.

Kata Kunci : Implementasi, PTSL, Kantor Pertanahan, tahapan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION POLICY BASED ON THE MINISTRY OF AGRARIAN AFFAIRS AND SPATIAL PLANNING/NATIONAL LAND AGENCY REGULATION NUMBER 6/2018 ABOUT COMPLETE SYSTEMATIC LAND REGISTRATION IN INDRAGIRI HILIR REGENCY

Agus Dhanang Purnomo
agusdhanangpurnomo@gmail.com
Graduate Studies Program
Indonesian Open University

This study focused on the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) Policy in the Indragiri Hilir Regency of Indonesia. The target was to issue 27,440 land title certificates, but only 17,692 were realized, leaving a difference of 9,748. The study used qualitative research methods and collected primary data through interviews, secondary data through literature review, and data from relevant agencies. The implementation of the PTSL policy was carried out through 13 stages, including planning, counseling, physical data collection, and juridical data collection. However, the issuance of land title certificates encountered difficulties, while other stages were carried out successfully. The study found that Resources and Dispositions variables were successful, but the bureaucratic structure and communication still needed improvement according to Edward III's four variables of policy implementation. The factors that influenced the implementation included inhibiting factors such as the Covid-19 pandemic, incomplete boundary markers, unlocated land owners, community land in a forest area, the payment of Acquisition Duty of Right on Land and Building (BPHTB), and the invalidity of administrative boundaries. Supporting factors included optimal formation of five Adjudication Committee Teams, optimum PTSL PM physical data collection carried out by KJSKB Muhammad Masykur and Partners, and optimum implementation of PTSL PM juridical data collection by Puldatan. The study's findings suggest that improvements are needed in bureaucratic structure and communication to increase the effectiveness of the PTSL policy implementation in the Indragiri Hilir Regency.

Key Words : Implementation, PTSL, Land Office, Stages

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM ILMU ADMINISTRASI BIDANG MINAT ADMINISTRASI PUBLIK – S2 REGULER

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul: Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) Di Kabupaten Indragiri Hilir

adalah karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar, Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (*plagiat*), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

UNIVERSITAS TERBUKA

Pekanbaru, November 2022
Yang menyatakan



Agus Dhanang Purnomo
NIM: 530030504

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

Judul TAPM	:	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI ATR/BPN NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nama	:	Agus Dhanang Purnomo, S.ST
NIM	:	530030504
Program Studi	:	Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik
Hari/Tanggal	:	Sabtu / 11 Februari 2023

Menyetujui:

UNIVERSITAS TERBUKA

Pembimbing II

Dr. Sudirah, M.Si
NIP.195902011987031002

Pembimbing I

Dr. Febri Yuliani, M.Si
NIP.197702032005012003

Mengetahui:

Ketua Pascasarjana Hukum,Sosial, dan Politik dan mengelola Program Magister Administrasi Publik pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Hj. Rulinawati
NIP.197803242001122022

Dekan Fakultas Hukum , Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Muhammad Husni Arifin , S.Ag., M.Si., Ph.D.
NIP. 197708282005011002

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto. 2005. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: PT. Rineka Cipta

Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy,* Congressional QuarterlyPress: Washington

Gasperz, Vincent. 1997. Manajemen Kualitas Dalam Industri Jasa. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka

Grindle, M. (Ed). 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World.* NewJersey: Princeton University Press

Gulo, W. 2000. *Metodologi Penelitian.* Jakarta: PT. Grasindo Anggota IKAPI Hardiansyah. 2011. *Kualitas Layanan Publik, Disertai dengan Konsep, Dimensi,Indikator dan Implementasi.* Yogyakarta: Gava Media

Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media

Jenkins, W.I.1978.*Policy Analysis.*Oxford: Martin Robertsen

Kusdarini, Eny. 2011. Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas UmumPemerintahan yang Baik. Yogyakarta: UNY Press

Mazmanian, Daniel, dan Paul A Sabatier, (eds). 1981. *Effective Policy Implementation.*

Lexington, Mass, D.C: Heath

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Rosda Karya Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi, Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti untuk PelayananPublik).* Bandung: Alfabeta

Pasalong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta Payne, Adrian. 2012.*The Essense of Service Marketing.* Yogyakarta: Andi

Rachmawati, I.N. 2007. *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*: wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia, 11 (1),* 35-40

Ratminto dan Winarsih. 2012. *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal).* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Saefullah. 2011. *Konsep dan Metode Pelayanan Umum yang Baik, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.* Sumedang: Fisip UNPAD

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2020. *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: LP3ES

Sinambela, Lijan Poltak. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik.* Jakarta: Bumi Aksara

Siti Prihatin Yuli. 2008. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Dan Pengaruhnya Terhadap Tertib Pertanahan (Studi Di Kelurahan Serdang Jakarta Pusat). Universitas Diponogoro: Semarang

Solichin Abdul Wahab. 2017. Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara.

Tjiptono, Fandy. 2013.*Servive Management, Mewujudkan Layanan Prima.* Andi: Yogyakarta

Ulfatin, Nurul. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan.* Malang: Bayumedia

Van Meter, D.S dan Van Horn, C.E.1978. *The Policy Implementation Process*: *A Conceptual Framework.* Administration and Society

Moenir. 2012. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia.* Jakarta: Bumi Aksara

Jurnal Penelitian

Jutje, S.Soputan Daicy Lengkong Femmy Tulusan, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Puskesmas. Bahu Kecamatan Malalayang Kota Madya Manado. Jurnal Administrasi Publik Universitas

Sam Ratulangi Manado

Christato Sinsu Mandey Novva Plangiten. 2016. Pemenuhan Dimensi-Dimensi Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado.

Jamaluddin, J., Nursadrina, N., Muh. Nasrullah, M. N., Darwis, M., & Salam, R. (2021). Efektivitas Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar. Jurnal Pallangga Praja, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sulawesi selatan

Kurniawan, W. A., Setiowati, S., & Supriyanti, T. (2018). Ekspektasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi Masyarakat. Tunas Agraria, sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta

Napitapulu, H. 2020. Implementasi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Ssitematis Lengkap di Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang.

Surianto, M., & Munir, A. M. (2021). Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Kepulauan Riau melalui Pendekatan Analisis Portofolio. Jurnal Pertanahan, PPSDM Kementrian ATR/BPN

Sumber Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar PokokAgraria

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksana Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah SistematisLengkap.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 Tentang ReformaAgraria

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Provinsi Riau Dengan Provinsi Jambi

Website

https://halosemarang.id/jokowi-pernah-rasakan-susahnya-urus-sertifikat-tanah diaksestanggal 5 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/23755/t/Komisi+II+Masih+Terima+Laporan+Pun gli+PTSL diakses tanggal 5 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB

https://www.kompas.com/properti/read/2022/01/06/160000121/rapor-pertanahan-10-7- juta-bidang-tanah-telah-terdaftar-?page=all) diakses tanggal 22 Februari 2022 pukul 15.00 WIB